

## Analisis Dampak Pembebasan Lahan Tol Terhadap Ekonomi Masyarakat Terdampak Di Desa Alassumur Lor

Nurul Ulfa Qomariyah<sup>1</sup>, Fitriyah<sup>2</sup>, Rizki Febri Eka Pradani<sup>3</sup>

Universitas Nurul Jadid, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

[nurululfa2003@gmail.com](mailto:nurululfa2003@gmail.com)<sup>1</sup>, [fitriyahz0189@gmail.com](mailto:fitriyahz0189@gmail.com)<sup>2</sup>, [febri@unuja.ac.id](mailto:febri@unuja.ac.id)<sup>3</sup>

Diserahkan tanggal 11 Juni 2024 | Diterima tanggal 13 September 2024 | Diterbitkan tanggal 30 September 2024

### Abstract:

*The land acquisition for the toll road in Alassumur Lor Village has significant impacts on the affected community's economy. This study analyzes the effect of toll land acquisition on the economic aspects of the impacted community in Alassumur Lor Village. The focus is on both the positive and negative impacts of toll land acquisition on the local economy, the responsible parties for the land acquisition, and the appropriate compensation costs. Through qualitative methods such as observation, Interviews, and documentation, it was found that despite an increase in income and expenditures, there are also negative impacts such as the loss of productive land and limited alternative employment opportunities. Understanding these consequences, this research provide valuable insights for improving infrastructure development policies in the future.*

**Keywords:** Toll Land Acquisition, Economic Impact.

### Abstrak :

*Pembebasan lahan tol di Desa Alassumur Lor berdampak besar pada perekonomian masyarakat terdampak. Penelitian ini menganalisis dampak pembebasan lahan tol terhadap perekonomian masyarakat terdampak di Desa Alassumur Lor. Fokusnya adalah pada dampak positif dan negatif dari pembebasan lahan tol terhadap ekonomi masyarakat di Desa Alassumur Lor, pihak yang bertanggung jawab dalam pembebasan lahan tol, dan biaya ganti rugi pembebasan lahan tol yang sesuai. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan bahwa meskipun ada peningkatan pendapatan dan pengeluaran, juga terdapat dampak buruk seperti kehilangan lahan yang produktif dan keterbatasan alternatif pekerjaan. Dengan memahami konsekuensi ini, penelitian ini memberikan pandangan berharga untuk perbaikan kebijakan pembangunan infrastruktur dimasa mendatang.*

**Kata Kunci:** Pembebasan Lahan Tol, Dampak Ekonomi.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



## PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana memiliki arti yang sama dengan fasilitas, menurut Arikunto dalam Arianto (2008) berpendapat bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang membantu dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha (Armansyah, 2013). Sarana dan prasarana fisik atau yang sering disebut infrastruktur adalah bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Dengan infrastruktur yang baik, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik ke layanan, barang, dan peluang pekerjaan, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan suatu wilayah (Suharyadi & Insani, 2016).

Prasarana jalan adalah komponen kunci dari infrastruktur transportasi yang sangat strategis. Jalan tol adalah salah satu infrastruktur transportasi yang sangat penting dalam menopang kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, didefinisikan sebagai bagian dari sistem jaringan jalan yang merupakan jalan umum dan dianggap sebagai jalan nasional, dimana para pengguna diharuskan membayar tol (Rahmawati & Tenriajeng, 2020). Jalan tol seringkali memiliki standar yang tinggi dalam hal kualitas, kecepatan, dan pelayanan daripada jalan raya. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi mobilitas yang lebih cepat dan efisien, serta untuk mendukung pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur transportasi. Tarif tol yang dibayarkan oleh pengguna digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan jalan tol tersebut.

Secara makro, jaringan jalan tol yang luas dan efisien dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mengurangi biaya logistik, mempercepat pergerakan barang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Secara mikro, ketersediaan jalan tol yang baik juga memengaruhi mobilitas individu dan bisnis. Yaitu dapat mengurangi waktu perjalanan, biaya bahan bakar, dan kemacetan lalu lintas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Oleh karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan tol adalah faktor penting dalam pengukuran dan meningkatkan kemajuan ekonomi suatu negara, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat (Sugara, 2021).

Jalan tol bukan hanya mencerminkan kemajuan ekonomi, tetapi juga kesiapan suatu negara dalam menghadapi perkembangan peradaban yang serba mudah dan cepat. Infrastruktur jalan tol yang modern dan canggih memberikan bukti akan kemampuan teknologi dan tata kelola yang efisien dalam melayani mobilitas masyarakat (Sembiring, 2022). Pembangunan jalan tol memerlukan lahan yang luas karena jalan tol dirancang untuk memberikan akses cepat dan bebas hambatan antara kota-kota atau wilayah (Noor et al., 2017). Untuk mencapai desain tersebut, seringkali diperlukan pembebasan lahan yang cukup luas, terutama jika proyek jalan tol melibatkan jalur baru yang melalui wilayah yang belum terganggu sebelumnya. Proses pembebasan lahan dan perencanaan yang cermat adalah bagian penting dari pengembangan jalan tol untuk memastikan bahwa konstruksi dan operasional jalan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Dasar hukum untuk negara memperoleh tanah yang telah dimiliki secara privat demi kepentingan umum terletak pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Fungsi dasar hukum ini berasal dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 1945, yang menetapkan konsep hak menguasai negara. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria melanjutkan dengan mengatur kewenangan hak menguasai negara tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 10 Huruf b secara spesifik mengatur jenis kegiatan yang masuk dalam lingkup kepentingan umum, seperti pembangunan jalan tol (Isnaeni, 2020).

Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol bisa mengubah tata guna lahan disekitarnya. Hal ini seringkali membuka peluang bagi pengembangan ekonomi daerah tersebut, karena jalan tol dapat memudahkan akses dan konektivitas antara kota-kota dan wilayah sepanjang jalan tersebut (Zulhaipa, 2016). Ini bisa mendorong perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi lokal

yang lebih baik. Namun, pembebasan lahan dan perubahan pemanfaatan lahan juga dapat berdampak signifikan terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar seperti buruh tani dan petani (Siddiq, n.d.). Perubahan ini bisa mempengaruhi pendapatan dan ekonomi rumah tangga mereka. Dengan begitu terdapat dampak dari pembebasan lahan tol yang mencakup perubahan dalam tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, termasuk migrasi penduduk, perubahan mata pencaharian, dan perubahan dalam pola kehidupan sehari-hari.

Fokus penelitian dimaksudkan untuk memperjelas beberapa masalah berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis dampak positif dan negatif dari pembebasan lahan tol terhadap perekonomian masyarakat terdampak di Desa Alassumur Lor, pihak yang bertanggung jawab dalam pembebasan lahan tol di Desa Alassumur Lor, serta biaya ganti rugi pembebasan lahan yang sesuai.

Penelitian ini memiliki signifikansi besar karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang dampak pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, terhadap kehidupan masyarakat yang terdampak, serta mengevaluasi kesesuaian proses pembebasan lahan dengan prosedur yang berlaku (Suraji et al., 2022). Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar yang mendesak untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur di masa depan, sehingga kesalahan yang sama dapat dihindari dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak positif dan negatif dari pembebasan lahan tol terhadap perekonomian masyarakat di Desa Alassumur Lor, siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pembebasan lahan tol di Desa Alassumur Lor, serta apakah biaya ganti rugi pembebasan lahan sudah sesuai. Dengan demikian, penelitian ini membantu dalam memahami konsekuensi ekonomi dari pembangunan jalan tol bagi masyarakat setempat, dan memberikan panduan yang berharga untuk perbaikan kebijakan dan tindakan yang akan datang dalam konteks pembangunan infrastruktur.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana berdasarkan pendapat Sugiyono (2017) metode penelitian kualitatif dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan penelitian yang memiliki dasar postpositivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data. Hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi (Arifah & Putri, 2021).

Tujuan dari penelitian kualitatif sesuai dengan pendapat Roni Ariawan (2020) adalah untuk mengeksplorasi pengalaman dan makna yang diberikan oleh individu dalam konteks alami mereka. Ariawan menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dan deskriptif dalam memahami fenomena secara mendalam. (Fadli, 2021).

Penelitian ini dilakukan di Desa Alassumur Lor dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling, dimana peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Ada tiga kriteria dalam memilih informan dalam penelitian ini, yaitu masyarakat yang tinggal di Desa Alassumur Lor, berusia antara 20 hingga 50 tahun, dan pemilik lahan yang terdampak pembebasan lahan tol Probowangi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi memungkinkan untuk mengamati perilaku dan situasi langsung, sementara wawancara memungkinkan untuk mendapatkan wawasan lebih dalam dari informan. Kombinasi ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang subjek penelitian, dengan melibatkan minimal 50 orang sebagai responden.

## PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian akan difokuskan pada identifikasi masalah yang terbagi dalam tiga aspek, yaitu dampak positif dan negatif dari pembebasan lahan tol terhadap perekonomian masyarakat terdampak di Desa Alassumur Lor, pihak yang bertanggung jawab dalam pembebasan lahan tol di Desa Alassumur Lor, serta biaya ganti rugi pembebasan lahan yang sesuai.

### **Dampak Pembebasan Lahan Tol Terhadap Perekonomian Masyarakat Terdampak di Desa Alassumur Lor**

Jalan Tol Probowangi merupakan bagian dari inisiatif Proyek Trans Jawa yang bertujuan untuk mengembangkan jalan tol dari Probolinggo hingga Banyuwangi dengan panjang keseluruhan mencapai 175,40 km. Untuk Desa Alassumur Lor total pemilik lahan yang terdampak sebanyak 93 bidang dengan jumlah penduduk 1.827. Kemudian dari 93 pemilik lahan yang terdampak, informan yang peneliti wawancarai sebanyak 50 orang. Proyek ini dibagi menjadi 7 seksi dan dilengkapi dengan 6 simpang susun, yaitu di Kraksaan, Paiton, Besuki, Situbondo, Asembagus, dan Bajulmati(PUPR, 2023).

Dengan berkurangnya tanah atau lahan akibat proyek jalan tol ini, muncul beberapa masalah bagi masyarakat yang terkena pembebasan lahan dan juga bagi mereka yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan. Sebagai contoh, banyak lahan sawah yang tergesur oleh pembangunan jalan tol, mengakibatkan perubahan bahkan kemungkinan hilangnya mata pencaharian masyarakat(Sumaryoto, 2010). Perubahan ini memiliki potensi besar untuk memengaruhi pendapatan mereka, dan perubahan dalam pendapatan dapat berdampak pada tingkat pengeluaran mereka.

Maka dari itu, temuan dari penelitian mengenai dampak pembangunan jalan tol Probowangi terhadap aspek ekonomi masyarakat Alassumur Lor terbagi menjadi dua aspek, yaitu pendapatan, dan pengeluaran. Pasca pembangunan jalan tol Probowangi, terlihat bahwa dampaknya pada masyarakat Alassumur Lor bersifat positif. Hal ini dapat diamati melalui perubahan sebagai berikut:

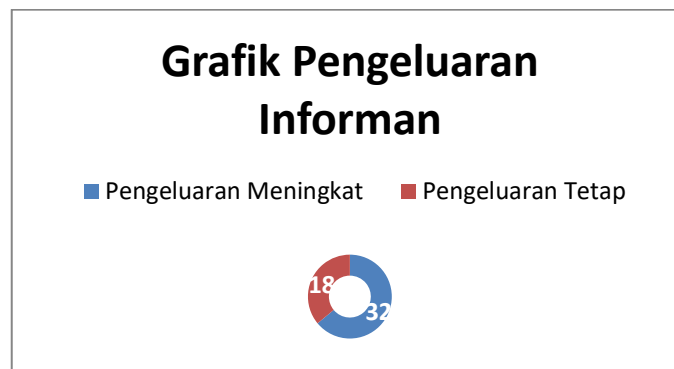
- 1.Transformasi dari keadaan tidak produktif menjadi produktif
- 2.Perluasan jenis mata pencaharian dengan bertambahnya sumber pendapatan sebagai tambahan.

Setelah terjadi pembangunan jalan tol Probowangi, terjadi perubahan signifikan di kalangan warga sekitar. Keberubahannya cenderung membawa dampak positif, khususnya dalam peningkatan pendapatan mereka. Pendapatan dapat diartikan sebagai uang yang diterima oleh individu atau perusahaan melalui berbagai bentuk seperti gaji, upah, komisi, ongkos, laba, dan bunga(Ferdini, 2019). Ini termanifestasi dalam aktivitas sehari-hari masyarakat, di mana setelah pengembangan infrastruktur tersebut, mereka menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam pekerjaan dan usaha. Peluang usaha yang muncul, seperti mendirikan usaha di sekitar proyek pembangunan jalan tol, memberikan dorongan bagi masyarakat untuk lebih giat berusaha. Akibatnya, pendapatan masyarakat meningkat dan tingkat pengangguran mengalami penurunan. Perubahan dalam mata pencaharian masyarakat ini berdampak positif terhadap pendapatan mereka, terlihat dari penelitian yang mencatat peningkatan pendapatan setelah pembangunan jalan tol Probowangi.



Gambar 1. Hasil wawancara dampak pembebasan lahan tol terhadap pendapatan masyarakat terdampak

Gambar 1 diatas menjelaskan bahwa dengan transformasi yang terjadi pada jenis pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat dan peluang kerja baru yang muncul, terdapat kontribusi signifikan terhadap perubahan pendapatan di kalangan masyarakat (Mahaputra, 2019). Pasca pembangunan jalan tol Probowangi, sebagian besar warga Alasumur Lor mengalami peningkatan pendapatan, seiring dengan adanya peluang kerja baru yang dihasilkan oleh proyek tersebut (Siswanto et al., 2019). Meskipun demikian, beberapa warga yang tidak mengalami peningkatan pendapatan setelah diwawancara menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kelangsungan usaha yang tetap dan modal yang tidak mengalami peningkatan.



Gambar 2. Hasil wawancara dampak pembebasan lahan tol terhadap pengeluaran masyarakat terdampak

Gambar 2 diatas menjelaskan bahwa pengeluaran masyarakat Alasumur Lor mengalami peningkatan rata-rata setelah pembangunan jalan tol Probowangi. Peningkatan pengeluaran disebabkan oleh kecenderungan konsumtif dari masyarakat yang menerima ganti rugi biaya pembebasan lahan (Noor et al., 2017). Mayoritas informan menyatakan bahwa seiring dengan kenaikan pendapatan, mereka cenderung mengalami peningkatan dalam pengeluaran. Alasan utama yang mereka berikan adalah penggunaan uang tambahan untuk kepuasan pribadi, seperti belanja, umroh, atau renovasi rumah. Mereka juga menyatakan bahwa tidak ada kebutuhan mendesak, mereka memilih untuk tidak menabung.

Sementara itu, warga yang tetap mempertahankan tingkat pengeluaran mereka memberikan alasan berbeda. Mereka menyatakan bahwa uang tambahan yang diperoleh akan disimpan sebagai tabungan karena mereka sudah berumur dan merasa tidak ada kebutuhan mendesak. Alasan lain termasuk menyimpan untuk keperluan anak cucu, kebutuhan darurat di masa depan, dan ketiadaan kebutuhan yang memerlukan pemenuhan segera.

Dalam paparan sebelumnya, peneliti menyajikan dampak positif dari pembebasan lahan tol Probowangi terutama terkait dengan peningkatan tingkat pendapatan dan pengeluaran. Namun, informasi dari wawancara dengan para informan juga mengungkapkan sejumlah dampak negatif dari pembebasan lahan tol Probowangi. Beberapa diantaranya mencakup:

#### 1. Hilangnya lahan produktif

Sebagai akibat dari pembebasan lahan untuk proyek tol dapat mengakibatkan dampak serius terutama bagi masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut untuk keberlanjutan mata pencaharian mereka. Bagi petani lahan bukan hanya tempat untuk bercocok tanam, tetapi juga merupakan pusat kegiatan ekonomi. Hilangnya lahan produktif ini dapat merugikan petani dan pelaku usaha lain yang bergantung pada keberlanjutan lahan untuk menghasilkan hasil pertanian atau menjalankan usaha mereka. Proses pembebasan lahan dapat mengganggu siklus tanam dan hasil pertanian masyarakat. Petani sering mengandalkan pola tanam dan panen tertentu, yang dapat terganggu akibat perubahan drastis dalam penggunaan lahan atau pemindahan ke lokasi baru. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan produksi dan pendapatan.

Hilangnya lahan produktif berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terkena dampak. Pendapatan dari hasil pertanian atau kegiatan usaha lainnya yang dilakukan di lahan tersebut dapat menurun, memicu ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga masyarakat.

#### 2. Keterbatasan Alternatif Pekerjaan

Masyarakat yang kehilangan lahan produktif mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan alternatif jika mereka tidak memiliki keterampilan atau keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam sektor pekerjaan yang berbeda. Misalnya jika sebagian besar penduduk terdampak adalah petani dengan keterampilan pertanian khusus, adaptasi ke sektor pekerjaan lain yang membutuhkan keterampilan berbeda bisa menjadi sulit.

Tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi keterbatasan alternatif pekerjaan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah mungkin lebih sulit menemukan pekerjaan yang memerlukan kualifikasi atau keahlian tertentu. Oleh karena itu, peningkatan kualifikasi pendidikan mungkin diperlukan untuk membuka peluang pekerjaan yang lebih luas.

### **Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pembebasan Lahan Tol di Desa Alassumur Lor**

Menurut Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021, penanggung jawab pembebasan lahan tol terletak pada pemerintah pusat dan daerah. Apabila keduanya tidak mampu melaksanakannya, badan usaha memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan lahan, sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ayat 2 peraturan tersebut.

Badan usaha yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada entitas ekonomi, termasuk dalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mereka diberikan tugas khusus oleh pemerintah pusat atau daerah, atau memperoleh wewenang melalui perjanjian dengan berbagai lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, serta badan hukum milik negara (BHMN) atau BUMN, sebagaimana diuraikan dalam ayat 3 peraturan tersebut.

Selanjutnya, terdapat ketentuan bahwa pencairan dana pembebasan lahan dilaksanakan melalui Bank BRI. Proses ini dilakukan dengan keterlibatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jalan tol yang berada di bawah naungan Jasa Marga, menandakan adanya koordinasi antara berbagai pihak untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan proses pembebasan lahan tol sesuai dengan regulasi yang berlaku.

### **Biaya Ganti Rugi Pembebasan Lahan yang Sesuai**

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum melibatkan konflik antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang diutamakan oleh pemerintah demi proyek pembangunan. Bagi

pemilik tanah yang terkena dampak, hubungan mereka dengan tanah bukan sekadar hubungan manusia dengan barang, karena tanah tersebut mungkin telah menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan keluarga selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, sulit bagi mereka melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum, dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang signifikan (Khasanah et al., 2017).

Dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pentingnya memberikan ganti rugi yang adil sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 sangat ditekankan. Ganti rugi harus dihitung dengan dasar yang jelas dan formulasi yang memastikan kelayakan dan keadilan, sejalan dengan prinsip undang-undang. Upaya perlindungan dan penghormatan hak atas tanah juga dapat terwujud melalui musyawarah dengan pemilik tanah untuk menetapkan besaran ganti rugi yang sesuai (Nasrudin, 2019).

Seperti yang disebutkan sebelumnya, perlindungan hukum sangat penting dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum terfokus pada aspek pemberian ganti rugi yang pantas dan adil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 secara tegas menetapkan pengadaan tanah sebagai tindakan yang melibatkan pembelian ganti kerugian yang sesuai kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ganti rugi dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi sangat krusial, dan perlindungan hukum menjadi hal yang sangat penting (Wirahadikusumah et al., 2013).

Kondisi ekonomi masyarakat sebagai penggarap yang terkena pembebasan lahan sulit pulih tanpa bidang usaha atau lahan pertanian. Ganti rugi non fisik menjadi krusial karena usaha atau pekerjaan adalah penopang perekonomian keluarga. Oleh karena itu, prinsip pemberian ganti rugi harus seimbang dengan nilai tanah, menghindari dampak negatif terhadap pemegang hak atas tanah. Penilaian besaran ganti rugi akan memengaruhi masa depan para pemilik tanah, sesuai dengan pandangan Adrian Sutedi (2020) yang menekankan pentingnya menjaga nilai ganti rugi agar setara dengan hak dan nilai tanah yang digusur.

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seringkali masyarakat yang hak atas tanahnya terkena proyek tersebut merasa tidak puas dan tidak berdaya. Ganti rugi menjadi isu sentral yang kompleks dalam upaya pengadaan tanah oleh pemerintah. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bentuk ganti kerugian, termasuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat.

Ganti kerugian seharusnya tidak hanya mencakup kerugian fisik yang hilang, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek non-fisik seperti pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dipindahkan. Pemberian ganti kerugian harus menghasilkan perbaikan dalam tingkat kehidupan petani penggarap yang kehilangan lahan, bukan menyebabkan kerugian pada kegiatan usaha atau bertani mereka. Dengan demikian, bila hal ini diakomodasi dengan baik, perlindungan hukum terhadap petani penggarap dapat terlaksana dengan efektif (Manoppo, 2019).

## **SIMPULAN**

Pembebasan lahan untuk tol Probawangi memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti hilangnya lahan produktif dan keterbatasan alternatif pekerjaan. Proses ini menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah, badan usaha, dan lembaga keuangan untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik tanah menjadi krusial, khususnya dalam pemberian ganti rugi yang adil sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012. Penilaian besaran ganti rugi sangat menentukan masa depan pemilik lahan, sehingga harus sesuai dengan nilai lahan yang terdampak. Diperlukan pengawasan ketat dan evaluasi terhadap proses pembebasan lahan untuk memastikan keadilan dan transparansi. Penelitian ini juga mengimplikasikan bahwa

pemerintah dan badan usaha juga harus menyediakan alternatif pekerjaan dan pelatihan bagi masyarakat terdampak untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal, serta memastikan bahwa proses pembebasan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, W. P., & Putri, N. E. (2021). *Implementasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin dari Aspek Pengadaan Tanah*. 13(2), 23–28.
- Armansyah, K. (2013). Hubungan Sarana Prasarana dan Caring Perawat Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Pada Ruang Rawat Inap RSUD Dr.R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. *Jurnal Pegabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2008, 27–48. <http://repository.ump.ac.id/8213/>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Ferdini, H. (2019). Dampak Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *E-Journal UNESA*, 2(1), 308–317.
- Isnaeni, D. (2020). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara. *Yurispruden*, 3(1), 93. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.5014>
- Khasanah, U., Nugraha, N., & Kokotiasa, W. (2017). Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono terhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 108. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1644>
- Mahaputra, I. (2019). ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATRA TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi .... *Al-Intifa': Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah*. <http://repository.radenintan.ac.id/5481/1/SKRIPSI> IRFANTRI MAHAPUTRA.pdf
- Manoppo, P. G. (2019). PELANGGARAN UU DAN ATURAN PEMBEBASAN TANAH RUAS TOL MANADO-BITUNG 2 DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK EKOSOBLING & MODAL SOSIAL PEMILIK TANAH. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(1), 208–226. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i1.4352>
- Nasrudin, M. R. (2019). Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Terhadap Alih Fungsi Lahan Permukiman Dan Persawahan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Duke Law Journal*, 1(1).
- Noor, T. R., Hamdan, A., Saifuddin, & Fanan, M. A. (2017). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto ( Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kec . Wringinanom , Kec . Kedamean , Kec . Driyorejo Kabupaten Gresik). *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 1(3),

- 268–280. <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/view/154>
- PUPR, K. (2023). *Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Tabap I Dimulai, Menteri Basuki: Ruas Pamungkas Trans Jawa*. 7 Februari 2023.
- Rahmawati, N., & Tenriajeng, A. T. (2020). Analisis Manajemen Risiko Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu). *Rekayasa Sipil*, 14(1), 18–25. <https://doi.org/10.21776/ub.rekayasasipil.2020.014.01.3>
- Sembiring, M. M. (2022). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Masyarakat : Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Minas. *Tesis*, 1–174.
- Siddiq, M. I. (n.d.). *Dampak Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Terhadap Masyarakat Kabupaten Pasuruan Mukhammad Irsyad Siddiq Abstrak*. 123466, 143–151.
- Siswanto, V. A., Wahjuningsih, T. P., & Murtini, M. (2019). Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Faktor Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Pada Usaha Batik Dan Perhotelan Di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 17, 83–92. <https://doi.org/10.54911/litbang.v17i0.110>
- Sugara, A. (2021). Kualitas Pelayanan Jalan Tol (Studi Kasus: Jalan Tol Soroja). *Elibrary Unikom*, 1–13.
- Suharyadi, H., & Insani, M. A. (2016). Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 239. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10014>
- Sumaryoto. (2010). Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, Sosial, Danekonomi Lingkungannya. *Journal of Rural and Development*, 1(2), 161–161.
- Suraji, S., Tendean, N., Basir, H., A., A., W, A. Z., & D, K. R. (2022). Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung. *Jurnal Media Birokrasi*, 85–98. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2773>
- Wirahadikusumah, R. D., Sapitri, S., Susanti, B., & Soemardi, B. W. (2013). Isu Strategis pada Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol dalam Kerjasama Pemerintah dan Swasta. *Jurnal Teknik Sipil*, 20(3), 233. <https://doi.org/10.5614/jts.2013.20.3.7>
- Zulhaipa, A. (2016). *Dampak Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah Dan Kondisi Sosial Masyarakat Di Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik*. 1–23.